



KESEJAHTERAAN DAERAH

Pemkot Yogyakarta Menggapai Masyarakat

Gimana sih tuh pegawai-pegawai kelurahan. Kemarin berkas saya sudah diterima, tapi karena lurahnya lagi sibuk jalan-jalan, jadi berkas saya belum bisa ditandatangani...Lurah kenapa jarang ada di tempat?

Oleh MOHAMMAD FINAL DAENG

Begitulah bunyi pengalasan pesan singkat (SMS) seorang warga Yogyakarta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Warga yang tak mengontumkan namanya itu ke-sal dengan pelayanan kelurahan yang dinilainya tidak profesional.

Satu hari kemudian, warga itu mendapat balasan dari Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta yang berterima kasih atas masukannya, dan berjanji menjadikannya bahan evaluasi dan pembinaan terhadap lurah dimaksud.

Keesokan harinya, si warga kembali mendapat SMS dari Kecamatan Kraton, kecamatan yang membawahi Kelurahan Panembahan. Isinya: terima kasih atas informasinya, dan kami telah menghubungi lurah yang bersangkutan, dan memang hari tersebut kebetulan hari krida (olah raga), jadi sebagian karyawan, termasuk Lurah Panem-

bahan, ikut kegiatan tersebut. Pada hari tersebut lurah juga menghadiri rapat di Kompleks Balai Kota. Selanjutnya, kami mohon maaf atas kejadian tersebut, semoga ke depan lebih baik lagi, terima kasih.

Ada lagi contoh lain: Pak saya sudah lapor dua hari yang lalu bahwa lampu penerangan jalan di Jalan Woro-Wari, Baeiro dan Pengok Kidul mati. Tapi nomor (dinas) Kimpraswil (Perumahan dan Prasarana Wilayah) tidak dapat dihubungi. Saya harus lapor ke mana pak? Terima kasih.

Gayung pun bersambut dari dinas terkait: Terima kasih atas masukannya. Akan kami cek ke lokasi. Untuk laporan bisa melalui telepon Din. Kimpraswil 515867 atau bisa melalui SMS UPIK ini.

Interaksi

Hal di atas merupakan sebagian contoh interaksi warga Kota Yogyakarta dan pemerintahnya. Program UPIK, yang sudah berjalan sejak 2004 itu, merupakan salah satu sarana yang digunakan pemerintah dengan basis teknologi komunikasi yang jumat digunakan warga saat ini, yakni telepon seluler.

Siapa pun, kapan pun, dan di mana pun warga bisa menyampaikan aspirasinya melalui layanan itu. Warga Yogyakarta, maupun luar Yoga, bisa mengajukan pertanyaan, kritik, saran, maupun keluhan seputar pembangunan dan layanan publik yang diselenggarakan Pemkot.

"Apa pun yang disampaikan, Pemkot melalui instansi terkait akan langsung merespons dalam setidaknya 2 x 24 jam," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Yogyakarta, Herman Eddy Sulistio, Jumat (21/1). Dalam sehari, UPIK menerima rata-rata 8-10 SMS warga.

Tapi, apa sebenarnya inti interaksinya? Boleh jadi semangat keterbukaan dan jujur dalam bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Bukan demi kantong sendiri.

Bukan hanya lewat UPIK pemerintah berdialog, Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto, juga membuka diri kepada warganya lewat siaran radio yang diudara-kan di empat stasiun radio lokal bertajuk "Wali Kota Menyapa".

Sebanyak dua minggu sekali dengan durasi 30 menit setiap kali acara, wali kota dan wakil wali kota bergantian langsung melayani keluhan, pertanyaan, maupun masukan warga.

"Pak Wali, itu di daerah Pajok Beteng Wetan lampu penerangan jalannya sudah sejak lama, kok mati semua. Di daerah Giwangan juga gelap, pak. Tolong diperbaiki," kata seorang teleponer bernama Handono pada sesi interaktif "Wali Kota Menyapa", Kamis (20/1) malam.

"Ya, coba saya cek. Saya telepon (dinas terkait) langsung sekarang," tanggap Herry yang malam itu menerima total tujuh teleponer dengan berbagai keluhan sarana-prasarana kota sekaligus masalah soal beberapa rencana pembangunan.

Kedua program itu merupakan bagian kecil dari komitmen

Dihaturkan Kepada:

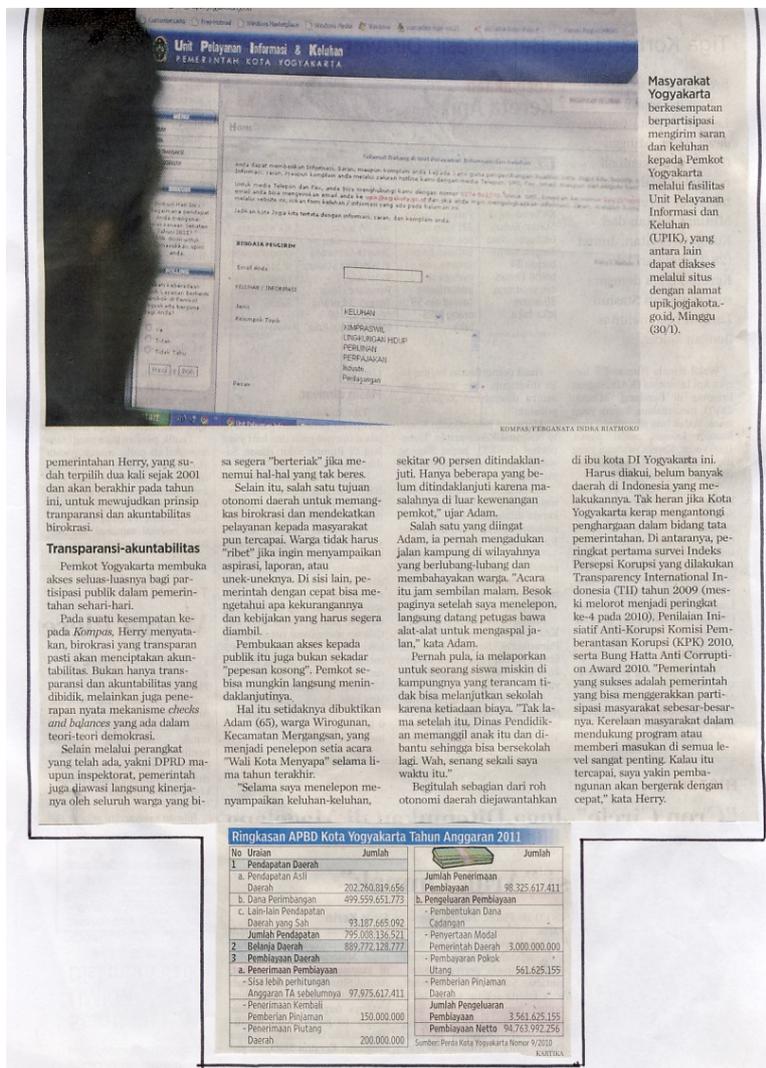
1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Sekretaris
4. Asisten

Tembusan Kepada:

1.
2.
3. Bag. Humas
4.
5.

	<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Sego <input type="checkbox"/> Blasé
--	---	---

✓ Positif
 ✓ Biasa
 ✓ Untuk diketahui



pemerintahan Herry, yang sudah terpilih dua kali sejak 2001 dan akan berakhir pada tahun ini, untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

Transparansi-akuntabilitas

Pemkot Yogyakarta membuka akses seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam pemerintahan sehari-hari.

Pada suatu kesempatan kepada Kompas, Herry menyatakan, birokrasi yang transparan pasti akan menciptakan akuntabilitas. Bukan hanya transparansi dan akuntabilitas yang dibidik, melainkan juga penerapan nyata mekanisme checks and balances yang ada dalam teori-teori demokrasi.

Selain melatih perangkat yang telah ada, yakni DPRD maupun inspektorat, pemerintah juga diawasi langsung kinerja oleh seluruh warga yang bi-

sa segera "berteriak" jika menemui hal-hal yang tak beres.

Selain itu, salah satu tujuan otonomi daerah untuk memangkas birokrasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pun tercapai. Warga tidak harus "ribe" jika ingin menyampaikan aspirasi, laporan, atau unek-uneknya. Di sisi lain, pemerintah dengan cepat bisa mengetahui apa kekurangannya dan kebijakan yang harus segera diambil.

Pembukaan akses kepada publik itu juga bukan sekadar "pepesan kosong". Pemkot se-bisa mungkin langsung menindaklanjutinya.

Hal itu setidaknya dibuktikan Adam (65), warga Wirogunan, Kecamatan Merjajung, yang menjadi penelpon setia acara "Wali Kota Menyapa" selama lima tahun terakhir.

"Selama saya menelepon menyampaikan keluhan-keluhan,

sekitar 90 persen ditindaklanjuti. Hanya beberapa yang belum ditindaklanjuti karena masalahnya di luar kewenangan pemkot," ujar Adam.

Salah satu yang diingati Adam, ia pernah mengadakan jalan kampung di wilayahnya yang berlubang-lubang dan membahayakan warga. "Acara itu jam sembilan malam. Besok paginya setelah saya menelepon, langsung datang petugas bawa alat-alat untuk mengaspal jalan," kata Adam.

Pernah pula, ia melaporkan untuk seorang siswa miskin di kampungnya yang terancam tidak bisa melanjutkan sekolah karena ketiadaan biaya. "Tak lama setelah itu, Dinas Pendidikan memanggil anak itu dan dibantu sehingga bisa bersekolah lagi. Wah, senang sekali saya waktu itu."

Begitulah sebagian dari roh otonomi daerah dijawantahkan

di ibu kota DI Yogyakarta ini.

Harus diakui, belum banyak daerah di Indonesia yang melakukannya. Tak heran jika Kota Yogyakarta kerap mengantongi penghargaan dalam bidang tata pemerintahan. Di antaranya, peringkat pertama survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) tahun 2009 (meski melorot menjadi peringkat ke-4 pada 2010). Penilaian Inisiatif Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010, serta Piang Hatta Anti Corruption Award 2010. "Pemerintah yang sukses adalah pemerintah yang bisa menggerakkan partisipasi masyarakat sebesar-besarnya. Kerelean masyarakat dalam mendukung program atau memberi masukan di semua level sangat penting. Kalau itu tercapai, saya yakin pembangunan akan bergerak dengan cepat," kata Herry.

No Uraian	Jumlah	Jumlah
1 Pendapatan Daerah		
a. Pendapatan Asli Daerah	202.740.819.656	Jumlah Penerimaan Pembayaran 98.325.617.411
b. Dana Perimbangan	499.559.651.773	- Pengeluaran Pembayaran
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	93.187.645.092	- Pembentukan Dana Cadangan
Jumlah Pendapatan	795.088.116.521	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3.000.000.000
2 Belanja Daerah	889.772.128.777	- Pembayaran Piutang Utang 561.628.155
3 Penerimaan Pembayaran		- Pemberian Pinjaman Daerah -
- Sisa lebih perhitungan Anggaran TA sebelumnya	97.975.617.411	Jumlah Pengeluaran Pembayaran 3.561.628.155
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	150.000.000	Penerimaan Netto 94.763.992.256
- Penerimaan Piutang Daerah	200.000.000	

Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 9/2010
KEMAS

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005